

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

- Tahun Sidang : 2017-2018
- Masa Persidangan : III
- Rapat ke- : 05
- Jenis Rapat : 1. Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
2. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dr. Nimmi Zulbainarni (Institut Pertanian Bogor) dan Dr. Chandra Nainggolan (Sekolah Tinggi Perikanan).
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Selasa, 16 Januari 2018
- Waktu : 13.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Alat Penangkapan Ikan (API)
- Ketua Rapat : Viva Yoga Mauladi, M.Si.
- Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
- Hadir : A. 31 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI;
B. Hadir Pemerintah:
1. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
2. M. Zulficar Mochtar, ST., M.Sc. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Dr. Nimmi Zulbainarni (Institut Pertanian Bogor); dan
4. Dr. Chandra Nainggolan (Sekolah Tinggi Perikanan) beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dr. Nimmi Zulbainarni dan Dr. Chandra Nainggolan dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan Alat Penangkapan Ikan (API) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, dibuka pukul 14.00 WIB oleh Ketua Rapat Viva Yoga Mauladi, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyerap aspirasi nelayan dengan memberikan kepastian dan kejelasan dalam kebijakan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) kepada nelayan dalam rangka menjamin dan melindungi hak pekerjaan sebagai warga negara Indonesia serta dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh nelayan Indonesia.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan program penggantian Alat Penangkapan Ikan dan program penyangga yang meliputi program kemudahan akses permodalan, bantuan sarana prasarana penangkapan ikan (kapal, mesin, jaring, dan pelatihan) serta kemudahan dalam akses kepengurusan dokumen perizinan kapal perikanan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan koordinasi yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang kelautan dan perikanan untuk melaksanakan uji petik tentang Alat Penangkapan Ikan cantrang dan sejenisnya secara independen.
4. Jika Pemerintah belum dapat menyelesaikan program penggantian Alat Penangkapan Ikan, maka Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menunda pelarangan penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang dilarang bagi yang belum menerima pengantian dan fasilitasi permodalan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.05 WIB.

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

Ttd.

VIVA YOGA MAULADI, M.SI..
A-493

DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP,

Ttd.

PROF. IR. SJARIEF WIDJAJA, PH.D., F.RINA.

KEPALA BADAN RISET
DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

M. ZULFICAR MOCHTAR, ST., M.SC.